NASKAH AKADEMI;K RAPERDA
· PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN PANGANDARAN
2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan

lsu strategis pembangunan tidak lagi hanya masalah terbangunnya .. bangunan · fisik, infrastruktur, dan majunya kegiatan ekonomi yang sifatllya masal. lsu tersebut merupakan masalah lama atau klasik dalam studi tentang pembangunan.

Selain masalah sosial dan budaya yang terkait erat dengan pembangunan, masalah lingkungan menjadi masalah yang semakiri lain menjadi semakin penting. Lingkungan telah inenJadi sa1ah satu indikator untuk menjustifikasi bBhwa pola pembangunan yang berkembang dan berjalan di suatu negara telah berjalan dengan baik atau tidak. Ata.u untuk ukuran sosial, apakah sudah manusiawi atau tidak.

Masalah lingkungan merupa masalah yang berdi.rD.ensi sangat luas. Masalah tersebut sangat terkait erat dengan bidElrlg sosial, ekonomi, politik, dan bahkan budaya setempat. Masalah lingkungan tidak dapat dipandang hanya dari segi teknis lingkungan saja. Namun harus melihatnya dalam konteks yang sangat lengkap.

Salah satu komponen lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas kehidupan dalam keseharian adalah sampah. Menurut Departemen Kesehatan, spah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses . Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam prose$-prOses ala.In tida.k ada sampah, yang ada hanya produkiproduk yang We bergerak. Sampah merui:>akan sisa. kehidupan dari atam. dan dari manusia. Sampah merupakan masalah terbesar yang dihadapi

oleh masyarakat, yang saat ini belum juga terselesaikan. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih kurang menyadari arti pentingnya lingkungan sehingga masyarakat tidak peduli dengan masalah yang dihadapi, malah masyarakat membuang sampah disembarang tempat.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang krusial bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena berdampak pada sisi kehidupan. Sampah akan terus ada dan tidak akan berhenti diproduksi oleh kepidupan manusia, jumlahnya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, bisa dibayangkan banyaknya sampah. Permasalahan ini akan timbul ketika sampah menumpuk dan tidak dapat dikelola dengan baik.

Sarnpah sudah menjadi masalah nasional dan global, bukan hanya lokal. Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbulan sampah sebesar 2-4% per tahun, namun tak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak terangkut. Belum adanya regulasi di tingkat nasional yang mengatur juga mengurangi upaya penanganan dan pengelolaan sampah secara optimal.

Permasalahan sampah sangat dipengaruhi oleh faktor: l) jumlah penduduk, 2) keaadaan sosial ekonomi masyarakat, dan 3) kemajuan teknologi. Meningkatnya jumlah penduduk, lahan yang terbatas, dan diiringi pola konsumtif masyarakat, maka secara tidak lansung .akan berdampak pada peningkatan volume, jenis dan jumlah sampah yang dihasiL1<an. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sa.mpah dengan pengelolaan dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Permasalahan ini muncul disebabkan sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, .

pemanfaatan dan pemusnahan akhir sarnpah baik sampah yang berasal dari kantor, sampah rumah tangga, sampah industri maupun sampah dari pasar.

Penanganan sampah merupakan pekerjaan terbesar dalam kehidupan manusia karena memperhatikan semua sisi lingkungan. Sebagaimana tertera pada Undang • Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa prinsip dalarU mengelola sampah adalah *reduce, reuse* dan *recycle* yang artinya adalah mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah clan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, paradigm.a pola pengelolaan sampah diharapkan tidak lagi mengandalkan pola kumpul angkut buang namun beralih ke pola pengurangan." dan penanganan sampah sejak dari sumber.

Kurangnya perhatian mengenai sampah serta pengaturan manajemen sampah di Kabupaten Pangandaran menimbulkan berbagai dampak negatif baik untuk manusia maupun untuk lingkungan itu sendiri. Misalnya, banyaknya warga masya.rakat yang terkena penyakit demam berdarah (DBD), serta kotomya lingkungan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah terutama untuk air tanah dan memberikan dampak yang buruk bagi makhluk hidup, sehingga dapat mengganggu keindahan, kebersihan, dan kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Contoh nyata yang terjadi Kabupaten Pangandaran adalah kebakaran yang terjadi di TPA Purbahayu. Hal ini menjadi sorotan utama oleh semua pihak yang memperhatikan Kabupaten Pangandaran yang dianggap baru menangangi beberapa hat . diantaranya tetang sampah. Kebakaran di TPA PUrbahayu sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan terutama di Lingkungan sekitar TPA.

Kompleksitas inilahyang menjadikan masalah sampah tidak dapat hanya diselesaikan hanya dengan satu jenis pendekatan saja. Namun harus menggunakan banyak pendekatan baik untuk kebutuban pengambiliin kebijakan hingga kepada implementasi kebijakannya.

Beberapa isu penting yang menjadi ruang lingkup persoalan pengelolaan persampahan di Kabupaten Pangadaran antara lain :

- Pembangunan yang berwawasan lingkungan bersih dari sam.pah;
- Pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan dengan optimalisasi pengelolaan sampah;
- Pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sampah;
- Bencana alam dan banjir yang terkait; dengan buruknya pengelolaan sampah;
- Pemeliharaan hewan, tumbuhan dan bagian alam la.irinya yang wajib untuk dilindungi keberadaannya akibat sifatnya yang khas.

lsu strategis di Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi isu berbasis potensi dan isu berbasis masalah. Pembangunan di Kabupaten Pangandaran dirilaksudkan untuk dapat mengembangkan wilayah berdasarkan potensi yang ada sekaligus dapat menyelesaikan masalah yang ada pada kawasa.n. Beberapa isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut.

1.1.1 IsuBerbasls Poten.si

Beberapa isu strategis di wilayah Kabupaten Pangandaran berbasis potensi antara lain adalah sebagai berikut :

a. Potensl Alam dan Budaya

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang basis utamanya adalah pariwisata. Sebagai kabupaten pesisir, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi pariwisata pantai dan lokasi wisata lainnya yang sangat banyak. Bahkan banyak pantai-pantai di Kabupaten Pangandaran · yang memiliki panorama yang sangat indah namun belum tersentuh dan masih sangat jarang dikunjungi wisatawan. Namun pantai-pantai tersebut memiliki potensi untuk dikembangka.n menjacli lokasi wisata altematif se1ain pantai pa.sir putih yang terletak di Kecamatan Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pariwisata alam lain, seperti taman wisata alam, cagar alam, serta suaka margasatwa .yang terletak ·di pananjung pangandaran. Di beberapa wilayah lainada pula jenis wisata alam lainnya seperti wisata rawa, sungai, dan lain sebagainya. Berbagai potensi wisata alam tersebut dapat dioptimalkan nienjacli lokasi wisata alam altematif di wilayah Jawa Barat, dengan perencanaan yang lebih matang terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukungn,ya.

Selain.itu terdapat pula beberapa jenis wisata budaya di Kabupaten Pangandaran yang berpotensi juga untuk dikembangkan. Dengan beragamnya jenis dan jumlah lokasi wisata di Kabupaten Pangandaran dapat meajadi salah satu faktor penarik Kabupaten Pangandaran untuk dikunjungi wisatawan bail< domestik maupun mancanegara, sehingga secara

tidak langsung dapat juga meningkatkan pendapatan Kabupaten Pangandaran.

Tetapi di sisi lain hal yang perlu diperhatikan adalah optim.alisasi pengelolaan sampahnya ketika isu potensi a1am dan budaya meningkat positif. Karena setelah dilakukan inventarisir potensi wisata dengan baik, bahwa potensi wisata yang dapat dioptimalisasikan di Kabupaten Pangandaran merata bukan hanya di wilayah pesisir.

b. Potensl Penlngkatan Aktlfitas Blsnis

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah sarat dengan aktifitas yang sangat ramai. Hal ini terjadi karena Kabupaten Pangandaran sudah dinobatkan sejak lama oleh masyarakat luas sebagai tempat destinasi wisata. Sehingga para pemilik modal berlomba dan bergegas untuk menan.amkan investasinya sebagai pusat bisnisnya. Adapun aktifitas peningkatan bisnisnya yaitu dibidang hotel, restoran, penjualan, dan jasa. Hal ini memiliki kesamaan pengaruh terhadap peningkatan volume sampah, sehingga sangat perlu dilaksanakan pengaturan dan pengelolaan sampah dengan baik dan terpadu yang tentunya digawangi oleh pemerintah sebagai fungsi pengaturan, fungsi kontrol dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

l,;l.2 lsu Berbaal• Maaalah

Sampah yang terdapat pada suatu areal yang belum terkelola dengan baik adalah masalah. Sehingga dengan teridentifikasinya kondisi tersebut, perlu

ditanggapi dengan peraturan yang fungsinya membenahi supaya masalah tersebut dapat diminim.alisir bahkan dikendalikan menjadi potensi pasitif untuk meningkatkan kualitas hidup khalayak di Kabupaten Pangandaran. Mengingat Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten baru yang sarat dengan aktifitas yang ramai, sehingga masalah yang ditimbulkan dari sampah sangat bervariasi dan berpotensi peningkatan volume sampah di atas rata rata. Adapun beberapa masalah yang timbul yaitu:

a. Belum tertanamnya kesadaran warga alcan pengelolaan sampah;
b. Belum terbentuknya Bank Sampah Berbasis Desa;
c. Belum tersedianya TPS di beberapa titik aktifitas warga;
d. Penugasan terhadap SKPD untuk menangani pengelolaan sampah;
e. Peraturan khusus untuk mengelola sampah pada sosial tertentu;
f, Volume sampah yang sangat besar di Kabupaten Pangandaran sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA);
g. Lahan TPA Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan pengkajian secara terintegrasi dari segi geologi, social, dan lingkngan hidup;
h. Teknologi pengelolaan sampah belum tertata dengan baik sesuai dengan karakter sampah sehingga sampah lanbat membusuknya, hal ini menyebabkan percepatan peningkatan volume sa.mpah lebih besar dari pembusukannya oleh

karena itu selalu diperlukan perluasan area TPA baru;

i. Sampah yang sudah layak menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA karena teknologi belum memadai;

j. Managemen pengelolaan sampah belum efektif sehingga seringkali menjadi penyeba.b distorsi dengan masyarakat setempat;

k. Pengelolaan sampah disarankan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan;

1. Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam memanfatkan produk sampingan sehingga tertumpuknya produk tersebut di lahan TPA.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Bagaimana menangani persoalan dalam melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran?

b. Ruang lingkup kebijakan apa yang dapat diambil dalam rangka menjadi keutuhan dan keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran dengan mengelola sampah dari berbagai sumbernya?

c. Bagaimana cara pembentukan Bank Sampah berbasis Desa?

d. Pendekatan – pendekatan apa saja yang dapat digunakan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran untuk mengelola sampah menjadi potensi dan tidak menimbulkan masalah ke depannya?

1.3 T\tjuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

a. Mengetahui dan mengkaji persoalan pengelolaan Sampah yang terjdi *di* Kabupaten Pangand untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah.

b. Mengetahui dan mengkaji ruang lingkup kebijakan apa yang dapat diambil dalam rangka menjadikan keutuhan dan keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran yang terbebas dari sampah. .

c. Mengetahui dan mengkaji berbagai kemungkinan pendekatan apa saja yang dapat digunakan masyarakat dan pemerintah terkait dengan perooalan sampah di Kabupaten Pangandaran.

1.4 llletode Penelltlan

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasamya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

1. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian ssiolegal. Naskah akademik ini menggunakan instrwnen penelitian yang berupa obsexvasi lapangan. Objek yang menjadi observasi adalah Masyarakat, Pemerintah, dunia usaha yang terkait dengan isu persampahan di Kabupaten Pangandaran.
2. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum

lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawaricara dan diskusi (/oa.l.s *group discussion).* Metode yuridis empiris atau sosio-legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian nonnatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan · (normatif) yang dilanjutkan dengan obsezvasi yang mendalam · serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB U
KAJIAN TEORITS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KaJlan Teodtls

2.1.1 Pengertlan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber basil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud bia$a atau utama dalam pemb, atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur, atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2005). Dalaxn Undang-Undang No.18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Sampah adalah suatu bahari yang terbuang atau dibuang dari sumbef hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Suprihtin, 1999). Sementara itu Radyastuti, 1996 {dalam Suprihatin, 1999) menyatakan bahwa Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai seil"ula (Tandjung, 1982 dalam

Suprihatin, 1999). Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan · dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah initidak seperti yang diharapkan. If.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tesebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi da1am pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di man&. sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat clidaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak clikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat.Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Sidik_ et al (1985) mengemukaan bahwa dua proses pembuangan akhir, yakni: *open dumping* (penimbunan secara terbuka) dan *sanitary landfill* (pembuangan secara sehat). Pada sistem *open dumping*, sampah ditimbun di areal tertentu tanpa .

membutuhkan tanah penutup, sedangkan pada cara sanitary *landfill*, sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Dalam Draf Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) disebut bahwa proses *sanitary landfill* (pembuangan secara sehat) adalah pembuangan sampah yang didesain, dibangu11:, dioperasikan dan dipelihara dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah (JICA 2005). ·

Metode *sanitary landfill* ini merupakan kuah satu metoda pengolahan sampah terkontrol dengan sistem anitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA (Tempat Pembuanagan Akhir). Kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi sistem saluran leachate yarig berfungsi sebagai saluran limbah cair sampah atau ke lingkungan. Pada metode *sanitary landfill* tersebut juga dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas hasil aktivitas penguraian sampah.

2.1.2 Jenls, Sumber dan Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sam.pah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah : ·

1. Sampah rumah tangga

   Yaitu sampah yang berbentuk pe.dat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak tennasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari

. lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rwruili atau dari komplek perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rum.ah tangga

Yaitu. sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rum.ah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar. pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas .· toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat · bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timb)ll secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam · UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan-kegiatan berikut :

1. Peogurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari proausen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di . sumbernya clan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang tennasuk dalam pengurangan sampah ini adalah

a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah

b. Membangun Bank Sampah di setiap Desa

c. Mengembangkan Telmologi bersih dan label produk

d. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur 1l1ang atau diguna ulang

e. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang

f. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

2. Penanganan sampah. yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS tau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atua tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut. dimanfaatkan atau dikembalikan a1am dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengharapka_n pemerintah kota/kabupaten dapat membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala kota/kabupaten atau provinsi. Forum ini beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan/persampahan, pakar, badan usaha dan lainnya;

Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah: memberikan usu pertimbangan dan saran terhadap 'kinerja' pengelolaaan sampah, membaritu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian

sengketa persampahan. Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persampahan itu sendiri masih bersifat sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan pengelolaan sampah sudah sangat mendesak, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dapat diimplementasikan.

Untuk pengelolaan sampah spesiilk baik B3.{bahan berbahaya dan beracun) dan sampah medis yang bersifat infektius mengenai pengelolaannya telah diatur da1am Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan , Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sejauh ini hanya mengelola srunpah domestik saja, sementara untuk sampah khusus seperti B3 dan sampah medis dikelola tersendiri oleh perusahaaan/lembaga penghasil sampah tersebut.

2.1.3 Komponen dan Sarana Pengelolaan Sampah

a. Komponen Pengelolaan Sampah

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah maka ada .b eberapa komponen yang terlibat, yaitu :

- Pemerintah

  Pemerintah adalah regulasi utama dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan penunjukan SKPD yang tepat dalam melaksankan tugasnya. Tugas utama pemerintah yaitu membuat suatu kebijakan yang dihubungkan:dengan kebijakan legislatif untuk melaksanakan kinerja pengelolaan sampah. Membangun kemitraan dengan pihak profit dalam mengelola sampah.

- Badan

  Badan yang dimaksud adalah SKPD tertunjuk oleh pemerintah daerah guna mengelola sampah. di Kabupa.ten Pangandaran dengan tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran untuk tidak menimbulkan masalah yang lebih buruk.

- Swasta

  Perusahaan swasta yang berkdudukan sebagai pengelola sampah guna meminimalisir volume sam.pah *di* TPS atau *di* TPA. Hal ini dikelola oleh swasta dengan kontrol, pengawasan, dan evaluasi ada di Pemerintah Daerah.

  Masyarakat

  Semua warga yang berada di Kabupa.ten Pangandaran.

b. Sarana Pengelolaan Sampah

  Sarana mobilisasi

  Saran.a mobilisasi adalah perangka keras berupa alat berat yang berguna untuk mengangkut dan menempatkan sampah pada tempatnya. Adapun beberapa alat berat yang diperlukan dalam hal mengelola sampah antara lain :

  · **Dump Truck,** alat berat ini berfungsi untuk menampung perjalanao sampah dari TPS ke TPA.

  Arm Roll, alat berat ini berfungsi untuk menampung · sampah dan diangkut ke TPA.

  Motor Pengangkut Sampah, alat pengangkut yang beroperasi di Desa.

  Gerobak Sampah, sebagai alat angkut di daerah pusat keramaian dengan orientasi kumpul angkut.

Excavator, alat berat yang digunakan untuk memindahkan volume sampah pada pusat pengelolaan sampah yaitu di TPA.

Whell Loader, alat berat yang digunakan untuk memindahkan volume sampah pada pusat pengelolaan sampahyaitu di TPA.

Sarana Bukan Mobilisasi,

TPS, Tempat pembuangan sementara berguna untuk penampungan sampah dari tempat yang berpotensi menimbulkan volume sampah. TPS harus memenuhi syarat yang sangat tepat. Komponen yang perlu sangat diperhatikan yaitu jarak dengan penduduk, daya tampung, kantor administrasi, sistem pemilahan, sarana operasional dan akses mobilisasi.

Tabe12.l3 f .

Daftar UPS di Setiap Kecamatan

Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Jumlah UPS
1	Lanaplancar	1
2	Cimerak	1
3	Cil>tH•ur	-
4	Ciiulang	▮
5	Parigi	1, ditambah pengusaha oerum (kondisional)
6	Sidamulih	1
7	Pangandaran	3
8	Kalinucang	1
9	Padaherang	1
10	Mamruniava	1

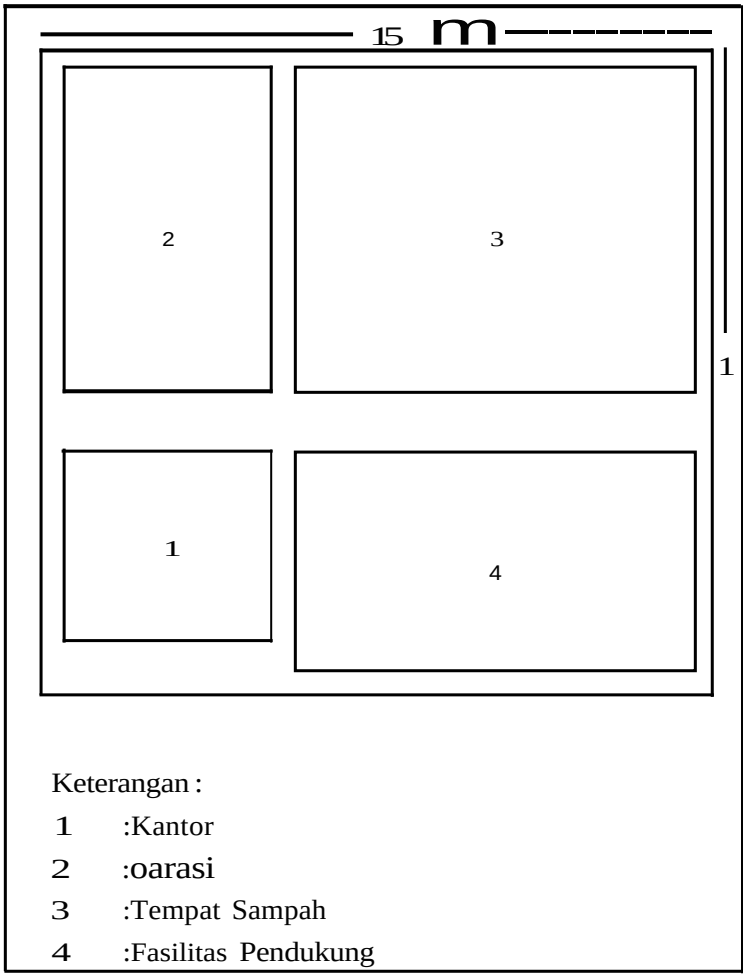

Gambar 2.1.3.1
Denah UPS

TPA, tern.pat pembuangan akhlr. Artinya TPA, merupakan akhir dari pengelolaan sampah. Di tern.pat

ini perlu menjadi perhatian khusus, karena ketika TPA memiliki kedudukan yang tepat dan berbagai ti?tjauan (geologi, sosial, clan lingkungan} maka keberadaan TPA akan terfungsikan dengan waktu yang sangat lama. Tinjauan Oeologi maksudnya melakukan pemetaan geologi untuk mengidentifikasi batuan dasar yang akan clijadikan media penyimpanan sampah (rekomendasi batuan beku atau batu lempung, Kabupaten Pangandaran masih banyak keterdapatan batuan beku (pada fonnasi Tomj)) adapun metoda yang digunakan yaitu suivey tinjau dan penelitian geofisika (menggunakan metoda geolistrik). Oengan mengidentifikasi batuan untuk TPA maka secara langsung meminimalisir penyebaran cairan ke lingkungan (batuan tersebut tidak me porositas). Tinjauan sosial dan lingkungan maksudnya dilakukan analisa ukl-upl guna mengkondusifkan keberadaan TPA. Luas TPA idealnya di atas 8 Ha yang terdiri dari kantor, tempat pengelolaan sampah organik, tempat pemilahan sampah anorganik, penampungan tinja dan pembuangan residu.

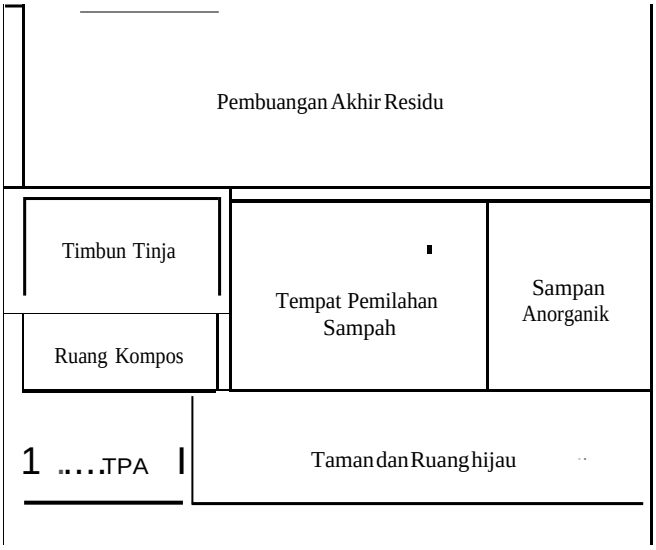

Gambar 2.13.2

Denah TPA

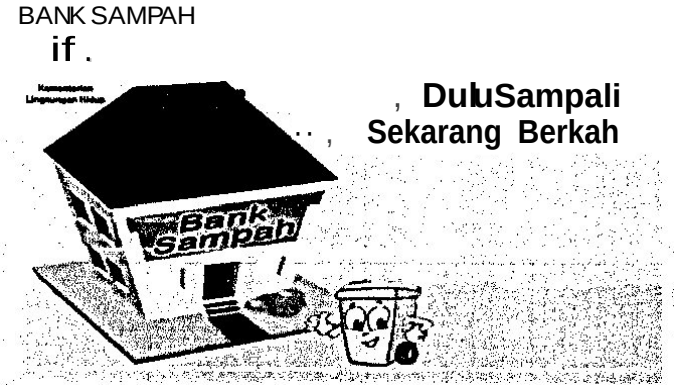

2.1.4 Sfstem Pengelolaan Sampah

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam teknis perencanaan,

penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini diperlukan ke.rena , sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan Pemda atau SKPD terkait saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.

Aparat terkait sebailmya tidak ikut' secara teknis, ini untuk menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu keterlibatan aparat terkait dikahawatirkan akan membentuk buday masyarakat yang bersifat.. tidak peduli. Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai fisilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen sampah. Hal ini diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi.

Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai sa1ah . satu upaya pengelolaan Sampah adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modem, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang .bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah .meningkatkan sistem

pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasisperan serta masyarakat.

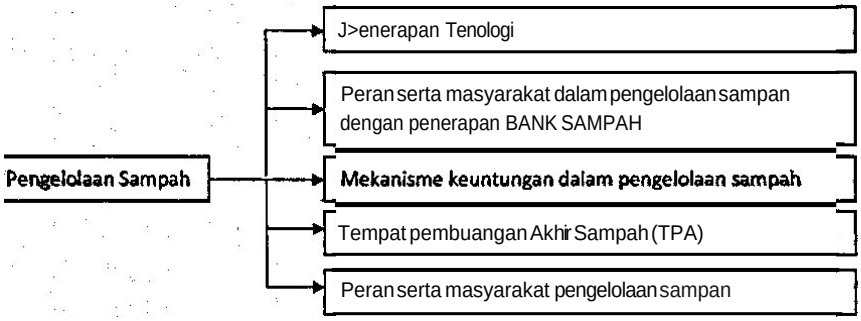

Swnber: Aboejoewono, •Pengelolaan Sampah Menuju Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya •DKI 1999

Gambar 2.1
Pengelolaan Sampah

Aboejoewono {1999} menyatakan bahwa perlunya kebijakan pengelolaan sampah yang ditetapkan di kota a.tau kabupaten di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu :

I. Penerapan teknologi yang tepat guna
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
4. Optimalisasi TPA sampah
5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

Penjelasan rinci dari Garn.bar 2.1. adalah sebagai berikut :

1. Penerapan teknologi

   Teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan , teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, Teknologi

Pengolahan Sampah Terpadu menuju *"Zero Waste"* harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan dalatn proses lanjutan yang um.um digunakan adalah :

1) Teknologi pembakaran *(Incenerator)*

Dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (skrap) dan uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari penggunaan alat ini adalah *:*

a. Dapat mengurangi volume sampah ± 75%-80% dari sumber sampah tanpa proses pemilahan.

b. Abu atau terak dari sisa pem.bakaran cukup kering dan bebas dari pembusukan dan bisa langsung dapat dibawa ke tempat penimbunan pada lahan kosong, rawa ataupun daerah rendah sebagai bahan pengurung (timbunan).

2) Teknologi *composting* yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah..Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti: kertas, *plastic* logam dan kaca/gelas.

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan penerapan BANK SAMPAH

Partisipasi masyarakat dalaln pengelolan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan saJah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa ikut

berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan prasana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal maupun formal. Terutama bntuk penanganan

. sampah di Kabupaten Pangandaran sangat direkomendasikan menerapkan · BANK SAMPAH yang dikelola dengan baik, guna menstimulus penanganan sampah.

3. Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah

Solusi dalam mengatasi masalah Sampah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang di mulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah mulai dari sumbemya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau skala perumahan. Dari sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa: biaya pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai pengangkutan sampah, tidak memerlukan lahan besar untuk TPA, dapat menghasilkan : nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan, . bersifat lebih ekonomis dan ekologis, dapat lebih memberda,yakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota.

4. Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)

Pada dasarnya pola pembuangan sampah yang dilalrukan dengan sistem Tempat Pembuangan Akhir. (TPA) sudah tidak relevan lagi dengan lahan kota yang sez.nakin sempit dan pertambahan penduduk yang pesat, sebab bila hal ini terus dipertahankan akan membuat kota dikepung •lautan

sampah" sebagai akibat kerakusan pola ini terhadap lahan dan volume sampah yang terus bertambah. Pembuangan yang dilakukan dengan pembuangan sampah secara terbuka dan di tempat terbuka juga berakiba.t meningkatnya intensitas pencemaran.Penanganan model pengelolaan sam.pah perkotaan secara menyeluruh adalah. meliputi penghapusan model TPA pada jangka panjang karena dalam banyak hal pengelolaan TPA masih sangat buruk mulai dari penanganan air sampah *(leache* sampai penanganan bau yang sangat buruk. Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah di perkotaan adhlah dengan Cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan, juga menghasilkan kegi.maan baru. Hal ini secara ekonomi akan mengurangi biaya penanganannya (Murthado dan Said, 1987).

5. Kelembagaan da1am pengelolaan sampah yang ideal.

   Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkaan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan &.Spek legal dalam pengelolaan sampah.

2.1.5 Aspek Manajemen dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Terry (1991) mfil.iajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu bentuk kegiatan, atau disebut *"managing'*, seda.ngkan pelaksananya disebut dengan *"manager'* atau pengelola. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan m.aupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana m.encapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Menurut Terry (1991), dalam melakukan pekerjaannya, manajer harus melaksanakan kegiatankegiatan' tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan clijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai ujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

1. *Planning*

   Planning merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang ·hendak dicapai sselama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapaat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. *Organinzing*

   Organizing merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan

memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

3. *Staffing*

   Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumberdaya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4. *Motivating*

   Motivating merupakan kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

5. *Controlling*

   .. Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif apabila perlu.

Di dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen dibedakan menjadi:

a. Planning

Berbagai batasan tentang *planning;* dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sruigat rum.it. Contoh proses perencanaan yang sederhana adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut Stoner, Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi.

b. Organizing

Orgartizing (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sarn.a dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.

c. Leading

. Pekerjaan *leading* meliputi lima kegiatan yaitu:

- •Mengambil keputusan
- •Mengadakan komunikasi agar. ada saling pengertian antara manajer clan bawahan
- •Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak
- •Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap.sikap bawahan agar mereka terampil da1am usaha mencapai tujuan yang ditetapkan .

d. Directing/Commanding

Directing atau *commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah at.au instruksi kepada bawahan dalam melaksa;1akan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan bail< dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

e. *Motivating*

Motiuating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan.

J. Coordinating

Coordinating atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan,